



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.49-51 Kel. Melayu Telp. (0541) 661034
Fax. 661807 Website : pertaniankukar.com E-mail:
distanak@kukarkab.go.id Tenggarong 75512



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditempuh melalui implementasi strategis, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis 5 (Lima) tahun Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan dan sasaran untuk pembangunan Tupoksi. Adapun tujuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Dinas Pertanian dan Peternakan dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusif,
 2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat tani dan ternak,
 3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya lahan, air dan teknologi dalam upaya optimalisasi produksi dan pelestarian agroekologi,
 4. Meningkatkan Kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan petani.
 5. Meningkatkan hasil produk peternakan beserta ikutannya,
 6. Meningkatkan usaha budidaya ternak sesuai potensi lokal/wilayah,
 7. Meningkatkan derajat kesehatan ternak masyarakat,
Dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan.
 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga tani melalui ketahanan pangan dan pemasaran hasil Pertanian dan Peternakan,
 3. Meningkatnya masyarakat tani dan ternak yang menggunakan paket teknologi dan terjadi peningkatan produksi Pertanian dan Peternakan,
 4. Meningkatnya produksi jagung melalui pengelolaan sumberdaya lahan dan air serta teknologi



5. Meningkatnya pengelolaan pelestarian agroekologi melalui pengembangan komoditas spesifik lokal,
6. Ketersediaan Pangan asal ternak,
7. Penurunan Kasus penyakit Ternak dan hewan lainnya,
8. Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna,

Dari Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut hingga sejauh ini Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan berbagai upaya terobosan dalam hal realisasi pelaksanaan fisik Kegiatan sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 215.087.694.836.00 atau sebesar 88,08 %. Adapun kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pertanian antara lain

1. Kurangnya dukungan Staf terhadap Komitmen Pimpinan
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki
3. Keterbatasan Benih Bermutu
4. Pengembalian fungsi kesuburan tanah yang masih rendah
5. Penggunaan pupuk dan pestisida belum optimal
6. Ketersediaan alat mesin pertanian belum cukup
7. Penanganan pengendalian serangan OPT masih minim
8. Pengolahan dan pemasaran hasil belum optimal
9. Intensitas pembinaan dan monitoring kegiatan lapangan belum optimal
10. Pemetaan wilayah komoditas prioritas belum jelas
11. Belum tersedia data dan informasi secara online
12. Masih Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
13. Sistem irigasi pertanian dan infrastruktur jalan usaha tani belum mampu mendukung untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil pertanian dan Peternakan secara memadai.
14. Kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan Peternakan khususnya lahan sawah ke sektor penggunaan lain.
15. Jalinan kerjasama kemitraan dan keterkaitan usaha di dalam internal sub sektor pertanian tanaman pangan & hortikultura maupun eksternal (dengan sub sektor/sector lainnya) masih lemah serta pemasaran produk masih terbatas di tingkat lokal.
16. Semakin meningkatnya harapan & tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi menuju terwujud-nya pelayanan bidang pertanian dan Peternakan



yang mampu memuaskan masyarakat.

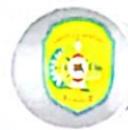
17. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
18. Perubahan Peraturan Pemerintah baik itu Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri.
19. Faktor-faktor pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Berdasarkan beberapa kendala dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sistem pengairan berupa ketersediaan waduk, bendungan dan jaringan irigasi yang jumlahnya masih terbatas.
2. Infrastruktur pendukung terutama jalan usaha tani dan akses jalan pedesaan ke lokasi pemasaran yang belum optimal.
3. Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) yang masih kurang ketersediaanya di tingkat kelompok tani.
4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal.
5. Produktivitas padi sawah yang belum maksimal (masih bisa ditingkatkan lagi)
6. Sumber daya manusia petani, penyuluh dan petugas terbatas kualitas dan kuantitasnya.
7. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima.
8. Kurangnya pengalaman usaha, modal usaha, jumlah ternak, jumlah tenaga kerja, pendidikan pengelola, ransum makanan dan pemberian obat-obatan baik secara bersama-sama maupun sendiri mempengaruhi keberhasilan peternakan.

Bertolak dari Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai diatas, maka Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan aparatur yang berkompeten, PPL dan/atau tenaga ahli dalam mengawal dan memfasilitasi pengembangan budidaya tanaman dan peternakan.
2. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga- lembaga litbang pertanian dan peternakan dalam rangka pemanfaatan, penerapan & pengembangan teknologi budidaya & pasca panen.
3. Melakukan kolaborasi dan sinergitas sumber daya dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, tingkat propinsi dan tingkat pusat dalam rangka perluasan areal persawahan



4. Mendorong dan memfasilitasi petani dan peternak untuk pengadaan sarana alsintan secara swadaya.
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama kemitraan di kalangan kelompok petani dan kelompok peternak / kelompok usaha pengolahan.
6. Mendayagunakan sarana informasi & promosi untuk memfasilitasi penciptaan kerjasama pemasaran hasil pertanian dan peternakan.
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan & pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan.
8. Mengikutsertakan PNS dalam berbagai pelatihan bidang perencanaan, administrasi, manajemen, keuangan & teknis pertanian dan peternakan.
9. Mengembangkan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Rumusan Strategi diatas kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan
 - 2) Mengembangkan Pertanian berbasis Kawasan
 - 3) Perbaiki sistem pertanian dari hulu sampai hilir
 - 4) Dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura
 - 5) Mengembangkan peternakan pola integrasi
 - 6) Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis
 - 7) Penerapan Teknologi Peternakan
 - 8) Meningkatkan kualitas sumber daya petani
 - 9) Mempermudah akses permodalan.
 - 10) Hilirisasi produk pertanian

Tenggarong, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan


Ir. H. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19670625 199203 1 007

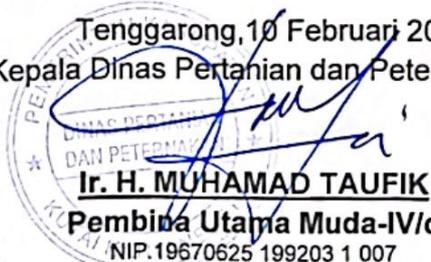
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin senantiasa kami panjatkan, karena dengan ridho-Nya dan inayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKjIP ini merupakan implementasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Subtansi LKjIP ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang berisikan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hasilnya akan dijadikan masukan dan umpan balik kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

Demikian, semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik oleh seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara serta bermanfaat dalam rangka meningkatkan keberdayaan petani dan mewujudkan kesejahteraan petani secara merata.

Tenggarong, 10 Februari 2025
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan



Ir. H. MUHAMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19670625 199203 1 007



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DASAR HUKUM	4
C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
D. DASAR HUKUM	6
E. SISTEMATIKA	7
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan sasaran	9
3. Indikator Kinerja Utama	10
B. Cascading	13
C. Strategy dan Arah Kebijakan	16
D. RENCANA KERJA TAHUN 2024	18
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III	35
AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024	35
REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV	67
PENUTUP	67
KESIMPULAN	67
SARAN DAN TINDAK LANJUT	69



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Peternakanselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Bentuk upaya perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai



kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003. Penyusunan LKJIP Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

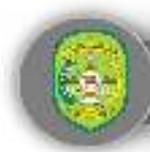
A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dijabarkan bahwa Distanak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan.

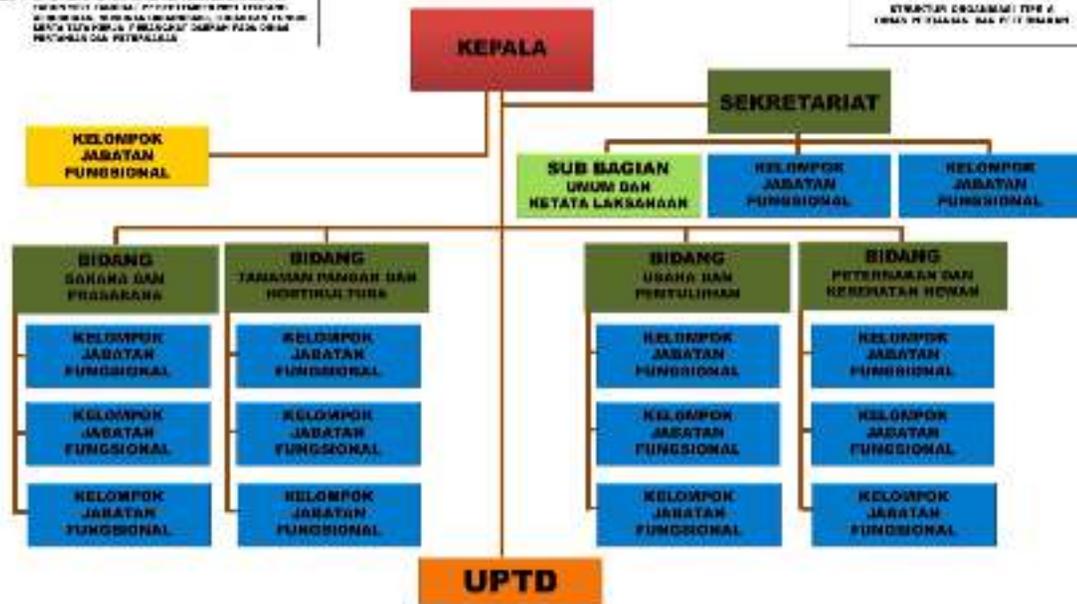
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan maka disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanian dan Peternakan, dimana Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Peternakan. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasar pada Pasal (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

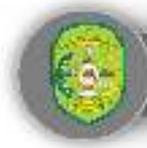
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional:
 2. Kelompok Jabatan Fungsional: dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Usaha dan Penyuluhan, membawahkan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan



B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DASAR HUKUM

Kedudukan Pada Bagian Kesatu Pasal (2) Dinas Pertanian dan Peternakan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pada Bagian Kedua Pasal (3) Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan.

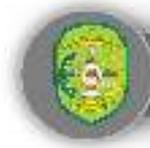
Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga Pasal (4), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian Dan Peternakan,
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanian Dan Peternakan
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pertanian Dan Peternakan,
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pertanian Dan Peternakan, Dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Oleh Bupati.

Core Area

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021 - 2026
menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian. 2. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian 3. Meningkatnya Produksi Peternakan 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani



C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan sangat mempengaruhi program pembangunan pertanian dan Peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan pertanian dan peternakan, permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang dating dan dampak negatif
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas pertanian dan peternakan dapat diidentifikasi 3 (Tiga) klasifikasi permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan, permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas.
2. Kualitas penerapan sistem dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan public yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi masih perlu di tingkatkan.

Pada tingkat implementasi program pada Dinas Pertanian dan Peternakan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomaly iklim dan degradasi lahan
- 2) Belum optimalnya infrastruktur pertanian
- 3) Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor
- 4) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani



- 5) Belum optimalnya kelembagaan petani
- 6) Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani.
- 7) Semakin meningkatnya harapan & tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi menuju terwujud-nya pelayanan bidang pertanian tanaman pangan & hortikultura yang mampu memuaskan masyarakat.

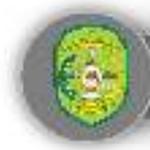
Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas dirumuskan masalah pokok produksi yang masih rendah, disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Keterbatasan sistem pengairan berupa ketersediaan waduk, bendungan dan jaringan irigasi yang jumlahnya masih terbatas.
2. Infrastruktur pendukung terutama jalan usaha tani dan akses jalan pedesaan ke lokasi pemasaran yang belum optimal.
3. Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) yang masih kurang ketersediaanya di tingkat kelompok tani.
4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal.
5. Produktivitas padi sawah yng belum maksimal (masih bisa ditingkatkan lagi)
6. Sumber daya manusia petani, penyuluh dan petugas terbatas kualitas dan kuantitasnya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);

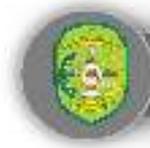


6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21); dan
10. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan

E. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN	(Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika)
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	(Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah)
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	(Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan)
BAB IV	PENUTUP	(Penutup)



BAB II

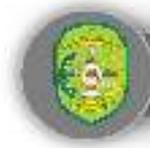
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nomor 6 tahun 2021. Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk



dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Kepala daerah terpilih adalah dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi :

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi :

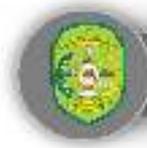
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
- Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
- Misi 3 Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah sesuatu yang diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 :

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2021–2026 menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan 2021-2026.

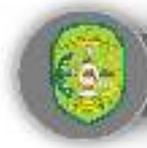
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian. 6. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian 7. Meningkatnya Produksi Peternakan 8. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 memperhatikan pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian dan Peternakan terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dapat dicapai dengan sasaran. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator :

- a. Produksi Komoditas Pertanian (Ton).
- b. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator :
Produktivitas Komoditas Pertanian (Ton/Ha).
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator : NTP Nilai Tukar Petani (%).



Berdasarkan Penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditentukan *Indikator Kinerja Utama* (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 sebagai ukuran tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Indikator Tujuan

Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ***Indikator Sasaran***

- a. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian
- b. Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian
- c. Meningkatnya Produksi Peternakan.
- d. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan target kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN			
1	Meningkatkan Produktivitas komoditas Pertanian	1. Padi	3,96	Jumlah Produksi Tanaman Pangan PerTahun Produktivitas = Luas Panen	Ton/Ha Ton/Ha	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Jagung	6,08				
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1. Padi	119.815,20	Produksi = Produktivitas x Luas Panen	Ton	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Jagung	86.895,00				
		3. Palawija (Porang)	540,00				
		4. Hortikultura	110,119.00				
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Daging	14.603.000,00	Bobot Karkas (Sapi) = Bobot Hidup x 45% Produksi Daging (Sapi) = Bobot Karkas x 75%	Kg	Bidang Peternakan Kukar	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Telor	1.691.000,00	Total Populasi x 90% Produksi Telor (Ayam Petelur) = 17 Butir Telur	Kg		
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,11	IT = Indeks Harga yang diterima petani IB = Indeks Harga yang dibayar petani Nilai Tukar Petani (NTP) = $\frac{IT}{IB}$ x 100%	Persen	BPS	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Sumber: Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan 2021-2026



B. Cascading

Gambar 1. Cascading





C. Strategy dan Arah Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun strategi guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada misi 3 “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dengan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian serta produksi dan populasi ternak dan kesejahteraan petani, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Peningkatan Produksi Daging dan Telur;
3. Meningkatkan Manajemen Usaha Tani; dan
4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang, seperti pada *Tabel 2.3*.



Tabel. 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategy (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepastian ketersediaan lahan pangan berkelanjutan					
	Mengembangkan Pertanian berbasis kawasan					
	Perbaiki sistem pertanian dari hulu sampai hilir					
	Dukungan sarana dan Prasarana tanaman pangan dan hortikultura					
Peningkatan Produksi Daging dan Telur serta Populasi Ternak	Mengembangkan Peternakan pola integrasi					
	Peningkatan pengamatan, penyidikan dan pengendalian PHM Strategis					
	Penerapan Teknologi Peternakan					
Meningkatkan manajemen usaha tani dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing komoditas pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya petani					
	Memperudah akses permodalan					
	Hilirisasi prodduk pertanian					



D. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Adapun Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

2. Sasaran :

- a. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian,
- b. Meningkatnya produksi komoditas pertanian
- c. Meningkatnya produksi peternakan
- d. Meningkatnya kesejahteraan petani

Selanjutnya dengan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	
					Lokasi	Target
1	2	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian			Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan			
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai		B
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen		100
Membantu Kepala, Daerah dalam, penyiapan dan perumusan kebijakan berdasarkan data			Validasi data dalam rangka perumusan kebijakan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	Persen		100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Nilai		64
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Dokumen		13



			Evaluasi Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	18 Kecamatan	6
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	18 Kecamatan	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	18 Kecamatan	1
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DKA-SKPD	Dokumen	18 Kecamatan	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	18 Kecamatan	1
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	18 Kecamatan	3
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan		17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Orang	18 Kecamatan	481
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang	18 Kecamatan	15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	18 Kecamatan	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	18 Kecamatan	16
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen		1
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	18 Kecamatan	1
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		2
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stell	18 Kecamatan	481
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Pegawai	Orang	18 Kecamatan	481
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan	Orang	18 Kecamatan	10



	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	18 Kecamatan	15
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	18 Kecamatan	7
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	18 Kecamatan	20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	18 Kecamatan	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1) Buku 2) Lembar 3) Buah	18 Kecamatan	3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang Disediakan	Eksemplar	18 Kecamatan	2000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	Orang/Tugas	18 Kecamatan	400
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)	Berkas	18 Kecamatan	650
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		50
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	Unit	18 Kecamatan	1
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun	Unit	18 Kecamatan	1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	18 Kecamatan	2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa	Bulan		12



			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jada Surat Menyurat	Bulan	18 Kecamatan	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	18 Kecamatan	12
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jada Surat Menyurat	Bulan	18 Kecamatan	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	18 Kecamatan	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	18 Kecamatan	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Bulan	18 Kecamatan	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		340
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak			
		Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	18 Kecamatan	2
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan			
		Lapangan		Unit	18 Kecamatan	215
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	18 Kecamatan	75
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	18 Kecamatan	48
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura			
				Persen		2.47



			Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Persen		0.33
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian		Padi	Ton/Ha		3.96
			Jagung	Ton/Ha		6.08
	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian		Padi	Ton		119,81 5.20
			Jagung	Ton		86,895
			Palawija (Porang)	Ton		540
			Hortikultura	Ton		110,11 9
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha		40,641
			Luas Tanam Jagung	Ha		13
			Luas Tanam Palawija (porang)	Ha		45
			Luas Tanam Hortikultura	Ha		27,782
			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor		36,157
			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor		17,991
			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor		16,908 ,000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan	Unit		10,984
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik				
		Lokasi	Jumlah Kawasan Sarana Pendukung Pertanian yang Diawasi	Kawasan	18 Kecamatan	5
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Luasan Lahan yang dikelola UPT/BPP	Ha	18 Kecamatan	3
			Jumlah Alsintan yang diadakan	Unit	18 Kecamatan	3,012
			Jumlah Saprodi yang diadakan	Ha	18 Kecamatan	1,3
			Jumlah Luasan benih padi yang diadakan	Ha	18 Kecamatan	3,6
			Jumlah Luasan Benih Jagung	Ha	18 Kecamatan	3
			Jumlah Luasan Palawija (Porang)	Ha	18 Kecamatan	14
			Jumlah Luasan Benih Hortikultura	Ha	18 Kecamatan	50
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Jumlah Pengembangan			



		Hewan, Tumbuhan, dan Mikro	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan			
		Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Komoditi		26
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Komoditi	18 Kecamatan	5
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Komoditi	18 Kecamatan	5
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Komoditi		5
	Meningkatnya Produksi Peternakan		Daging	Kg		14,603,000
			Telur	Kg		1,691,000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Cakupan Pengawasan	Jenis		2
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Rekomendasi Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dokumen	18 Kecamatan	4
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Rekomendasi Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Dokumen		4

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 25 bulan Nopember tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktifivitas Padi	Ton/Ha	3,96
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,08
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	Ton	119.815,2
		Produksi Jagung	Ton	86,895
		Produksi Palawija (Porang)	Ton	540
		Produksi Hortikultura	Ton	110.119
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Kg	14.603.000
		Produksi Telur	Kg	1.691.000
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil BPK/Inspektorat Yang ditindak lanjuti	Persen	100



6	Terlaksananya Kepatuhan Input Sirup	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Kepatuhan waktu input e—pantau dan telah diverifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan barang milik daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian usulan standar harga satuan (SHS) Perangkat daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
10	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) Perangkat daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100
11	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian indikator kinerja kunci (IKK) LPPD Perangkat daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian Laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) semester I paling lambat akhir bulan Juni dan semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100



14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik (FKP)	Persen	100
15	Menyelesaikan Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK)	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100
16	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	Persen	100
17	Penerapan core values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
19	Terlaksananya Serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
20	Ketersediaan Dokumen manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
21	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai maturitas SPIP pada perangkat daerah	Persen	100
22	Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah	Nilai tata kelola ARSIP perangkat daerah	Persen	100
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Persen	100
24	Peningkatan Prestasi inovasi	Prestasi inovasi perangkat daerah	Persen	100
25	Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Persen	100
26	Meningkatnya pengamanan aset	Pengaman aset tanah	Persen	75
27	Meningkatnya tata kelola aset	Pakta integritas pemakai aset BMD tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
28	Terlaksananya program pengentasan kemiskinan pada perangkat daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1



29	Menurunnya prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target nasional	Persen	14
30	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100
31	Peningkatan Investasi	Capaian investasi kabupaten kutai kartanegara	Rupiah	7,3 T
32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5%-3,5%	Persen	100
33	Kepatuhan pelaporan P3DN	Persentase tingkat kepatuhan pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
34	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
35	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP pemerintah daerah	Nilai	73
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah	Nilai	64
37	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	49,57
38	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik pemerintah daerah	Nilai	8,95
39	Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai kepatuhan standar pelayanan pemerintah daerah	Predikat	Zona Hijau
40	Terwujudnya kawasan tanpa rokok/vape	Kawasan tanpa rokok/vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
41	Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
42	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100
43	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian indikator kinerja perangkat daerah	Persen	100
44	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan pemetaan kemampuan mengaji ASN perangkat daerah	Laporan	1
45	Terbentuknya unit pengumpul Zakat (UPZ) perangkat daerah	SK pembentukan UPZ perangkat daerah	Surat Keputusan	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan:

Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	3,96	
	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	119.815,20	
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Telur	1.691.000,00	
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,11	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,00	92.959.786.763
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	902.000.000
1	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	6	592.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	60.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	250.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	74.637.079.077
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	481	68.399.963.718
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	495.840.000
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah utang yang telah dibayarkan	4	5.456.875.359
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	284.400.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	70.000.000
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	70.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	590.000.000
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481	50.000.000



10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	540.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	1.726.065.700
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	47.076.700
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	445.000.000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	100.000.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2000	550.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	518.565.000
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650	65.424.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	50	7.186.059.350
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	180.000.000
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1.100.000.000
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	5.906.059.350
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	5.937.293.636
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	1.194.540.581
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	150.000.000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4.592.753.055
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	340	1.911.289.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	139.106.000
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	219	1.127.183.000
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	645.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	40.641,30	61.404.068.052
		Luas Tanam Jagung	13.000,00	
		Luas Tanam Palawija (Porang)	45,00	
		Luas Tanam Hortikultura	27.781,65	
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	36.157,00	
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	17.990,53	



		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	16.908.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	10,981	45.599.068.052
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2	300.000.000
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7	45.299.068.052
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	26	600.000.000
28	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6	220.000.000
29	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5	110.000.000
30	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5	270.000.000
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	2	150.000.000
31	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	75.000.000
32	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4	75.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			275.000.000
33	Penjaminan Peredaran HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	1	110.000.000
34	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2	165.000.000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	322	14.780.000.000
35	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2	250.000.000
36	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	538	14.530.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	20.000,00	65.923.291.920
		Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	23,00	
		Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	17.000,00	
		Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	6,00	
		Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	33,00	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1	1.350.000.000
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18	200.000.000



38	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	1.150.000.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		64.573.291.920
39	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23	13.912.020.000
40	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	40	25.060.501.920
41	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6	2.150.000.000
42	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	33	1.975.000.000
43	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	400.000.000
44	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	10.148.170.000
45	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	17000	10.927.600.000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	95,00	1.737.300.000
		Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5,00	
46	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	1.012.300.000
47	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2	100.000.000
48	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	65	100.000.000
49	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	150	812.300.000
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	2	200.000.000
50	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2	100.000.000
51	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3	100.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	2	300.000.000
52	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2	100.000.000



53	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2	200.000.000
54	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Peternakan	3	225.000.000
55	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30	75.000.000
56	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	70	75.000.000
57	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7	75.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	90,00	1.632.265.474
58	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	2,4	1.632.265.474
59	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dan Peternakan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian dan Peternakan yang Dikendalikan	2000	1.100.000.000
60	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dan Peternakan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian dan Peternakan yang Ditangani	200	200.000.000
61	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dan Peternakan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian dan Peternakan		
62	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang bersifat zoonosis	90	232.265.474
63	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dan Peternakan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Pertanian dan Peternakan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	200	100.000.000
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	35,00	400.000.000
64	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	250.000.000
65	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	20	250.000.000
66	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	15	150.000.000
67	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	15	150.000.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	3,00	20.144.278.650
68	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	90	20.144.278.650
69	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19	7.334.703.650



70	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2743	9.300.000.000
71	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19	1.600.000.000
72	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11	909.575.000
73	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	32	1.000.000.000
				244.200.990.859

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Anggaran KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024



Anggaran Tahun 2024

Untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024 sebesar Rp. 218.866.459.793,00 dan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 25.334.531.066,00 dengan total APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 244.200.990.859,00.

Tabel 2.7. Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024

N O	KETERANGAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan	218.866.459.793,00	25.334.531.066,00	244.200.990.859,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024

Akuntabilitas kinerja merujuk pada tanggung jawab untuk secara terbuka memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan kinerja atau yang memberikan mandat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai pelaksana amanah masyarakat, memenuhi kewajiban akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut mencerminkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan regulasi tersebut, evaluasi kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Evaluasi kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan implementasi kegiatan sejalan dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk mencapai misi dan visi lembaga pemerintah. Proses evaluasi kinerja ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan kinerja tersebut, capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung berdasarkan evaluasi



atas masing-masing indikator kerjanya, sedangkan capaian kinerja dari tujuan/sasaran dihitung berdasarkan evaluasi atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis. Sementara itu, cara untuk menyimpulkan hasil evaluasi kinerja capaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian dari indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Kemudian, berdasarkan evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan tujuan memberikan informasi yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan capaian atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan evaluasi tingkat pencapaian target kegiatan dari berbagai kelompok indikator kinerja kegiatan, serta evaluasi tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang diuraikan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan telah berhasil atau gagal dilaksanakan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan



Peternakan Tahun 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, pertama kali yang perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama tersebut akan terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah tersebut. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian dan Peternakan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Proses reviu tersebut dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Peternakan dapat dilihat pada tabel hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:



Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
				2024	2024	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	2,47	4,66	188,66	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2024
		2. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Peternakan	Persen	0,34				
	1. Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton/Ha	3,96	4,3.36	109,49	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2024
		2. Jagung	Ton/Ha	6,08	5,10	83,88		
	2. Meningkatkan Produksi Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton	119.815,20	101.678.94	0,85	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2024
		2. Jagung	Ton	86.895,00	8.542,50	9,83		
		3. Palawija	Ton	540,00	-	-		
		4. Hortikultura	Ton	110.119,00	78.680,46	71,45		
	3. Meningkatkan Produksi Peternakan	1. Daging	Kg	14.603.000,00	28.069.290,00	192,22	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2024
		2. Telur	Kg	1.691.000,00	2.451.881,00	145,00		
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	104,11	104,14	100,03	Sangat Tinggi	E-Pantau DISTANAK 2024

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2024



**Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2023 s.d 2024**

No	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	2,22	2,47	5,13	4,66	231,08	188,66
		2. Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Peternakan	Persen	0,33	0,34				
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton/Ha	3,79	3,96	4,34	4,3.36	114,51	109,49
		2. Jagung	Ton/Ha	5,81	6,08	5,09	5,1	87,61	83,88
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	1. Padi	Ton	118.705,80	119.815,20	115.103,82	101,678,94	96,97	0,85
		2. Jagung	Ton	54.246,00	86.895,00	7.673,95	8.542,50	14,15	9,83
		3. Palawija	Ton	385	540	-	-	-	-
		4. Hortikultura	Ton	108.303,00	110.119,00	70.490,38	78.680,46	65,09	71,45
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Daging	Kg	14.317.000,00	14.603.000,00	20.350.720,00	28.069.290,00	142,14	192,22
		2. Telur	Kg	1.641.000,00	1.691.000,00	3.820.404,00	2.451.881,00	232,81	145
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	101,07	104,11	101,07	104,14	100	100,03

Sumber : Dinas Pertanian Dan Peternakan Tahun 2024



Tabel 3.4. Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	4,3.36	4,39	101,37
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	101.678,94	122.034,00	104,84
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Telor	2.451.881,00	1.794.000,00	136,67
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,14	111,09	93,74

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi dari Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi 2. Luas Tanam Jagung 3. Luas Tanam Palawija 4. Luas Tanam Hortikultura 5. Peningkatan Populasi Ternak Besar 6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	40.641,30 13.000,00 45,00 27.781,65 36.157,00 18.441,00	29.307,80 1.658,70 14,00 14.827,22 16.198,00 12.836,00	72,11 12,76 31,11 53,37 44,80 69,61	- Ketersediaan lahan - Ketersediaan Benih Unggul dan Saprass penunjang - Produk pertanian sebagian besar merupakan kebutuhan utama -Permintaan daging dan minat masyarakat yang tinggi untuk beternak	- Dampak perubahan iklim - Keterbatasan Pupuk Bersubsidi - Berkurangnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian - Adanya pembatalan pengembangan jagung oleh investor - Khusus tanaman palawija (Porang) harga jual produksi sejak tahun 2022 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan - Tidak semua jenis ternak dapat didatangkan dari luar daerah - Kasus penyakit hewan yang perlu perhatian khusus sehingga perlu adanya seleksi ketat sebagai upaya mencegah penularan penyakit	



2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	16.975.000,00	19.370.909,00	114,11	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2. Menjadi kebutuhan bagi kelompok tani/Gapoktan untuk mengatasi ketersediaan air dalam budidaya tanaman 3. Tersedianya lahan atau tempat untuk pelaksanaan kegiatan secara swadaya dari kelompok tani/Gapoktan 4. Adanya proposal Kelompok Tani/Gapoktan	1. Tingginya curah hujan pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga dapat memperlambat proses pekerjaan 2. Akses menuju ke lokasi kurang memadai 3. Sulitnya mendapat lokasi untuk pelaksanaan Kegiatan. 4. legalitas lahan dan sumber daya manusia
		1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	20.000,00	43.307,00	216,54		
		2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	23,00	22,00	95,65		
		3. Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	17.000,00	15.738,94	92,58		
		4. Jumlah DAM Parit yang dibangun	6,00	6,00	100,00		
		5. Jumlah Pintu Air yang dibangun	33,00	43,00	130,30		
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	95,00	98,00	103,16	Meningkatnya kasus penyakit hewan tidak menular maupun menular (zoonosis) di beberapa daerah juga berdampak pada daerah Kaltim khususnya Kukar	- Terjadi gangguan alat reproduksi - Terjadi penyakit brucellosis - Terjadi distosia dll
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5,00	5,00	100,00		
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan	90,00	90,85	100,94	Tersedianya sarana pengendalian OPT	Dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada peningkatan serangan OPT



		Bencana Pertanian						
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	3,00	2,40	80,00	Ketersedian pendanaan dan konsep pembinaan	1. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh dan luasnya wilayah kerja serta jumlah kelompok tani yang banyak dan waktu terbatas 2. Kemampuan pengurus kelompok tani melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala untuk setiap kegiatan	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	90,00	80,00	88,89	Ketersedian pendanaan dan konsep pembinaan	Kemampuan kelompok dalam bekerjasama dengan mitra usaha yang mendukung kegiatan usaha tani	



Tabel 3.6. Perbandingan capaian kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi				Tingkat Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
				Kinerja	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	40.641,30	14.240.000.000	29.307,80	72,11	55.263.661.000	388,09	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	13.000,00		1.658,70	12,76				
		3. Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	45,00		14,00	31,11				
		4. Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	27.781,65		14.827,22	53,37				
		5. Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	36.157,00		16.198,00	44,80				
		6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	18.441,00		12.836,00	69,61				
		7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	16.975.000,00		19.370.909,00	114,11				
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	20.000,00	26.661.000.000	43.307,00	216,54	57.353.263.900	215,12	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	23,00		22,00	95,65				
		3. Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	17.000,00		15.738,94	92,58				



		4. Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	6,00		6,00	100,00				
		5. Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	33,00		43,00	130,30				
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persentase	95,00	975.000.000	98,00	103,16	1.751.300.000	179,62	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5,00		5,00	100,00				
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase	90,00	3.050.000.000	90,85	100,94	1.432.265.474	46,96	Dinas Pertanian dan Peternakan	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase	3,00	7.400.000.000	2,40	80,00	18.357.360.728	248,07	Dinas Pertanian dan Peternakan	
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persentase	90,00	400.000.000	80,00	88,89	193.269.000	48,32	Dinas Pertanian dan Peternakan	



Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tambahan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,96	4,3.36	109,49
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	Ton	119.815,20	101.678,94	0,85
3	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Telor	Kg	1.691.000,00	2.451.881,00	145,00
4	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	NTP	104,11	104,14	100,03



Tabel 3.8 Analisis Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah

N o.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah (Diisi Oleh OPD)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64	64	92,959,786,763	71,397,577,611	Masih rendahnya SDM pengelolaan pertanian dimasa mendatang	1) Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur Peningkatan ketersediaan air meliputi pembuatan embung, 2) Perbaikan jaringan irigasi yang rusak, 3) Pelaksanaan program pompanisasi dan pipanisasi; 4) Peningkatan kapasitas petani dan fasilitasi penyediaan sarana produksi yang tepat guna dan tepat waktu untuk mendukung peningkatan penerapan teknologi; 5) Peningkatan kemampuan sumberdaya petani harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, kursus-kursus atau sekolah



										lapang sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian secara menyeluruh. 6) Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, program yang akan ditekankan yaitu peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya, serta menata jaringan agribisnis agar tercipta situasi usaha tani yang kondusif dan menguntungkan semua pihak, khususnya Petani.
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	902,000,000	812,858,420	Target sudah tercapai, namun antar Bidang belum saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Antara Bidang harus saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Laporan	17	17	74,637,079,077	54,439,649,531	Target sudah tercapai, namun Proses Pelaksanaan administari masih	Petugas harus segera melakukan koordinasi jika terdapat kendala



			Daerah yang akuntabel						ada kendala dalam penetapan hasil ahir didalam aplikasi	kendala dalam penetapan hasil ahir didalam aplikasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	70,000,000	34,765,000	Target sudah tercapai, namun Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output	Harus petugas segera melakukan koordinasi jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan penganggaran
4	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	590,000,000	554,000,000	Target sudah tercapai, namun Masih rendahnya SDM ASN dan Non Asn berkelanjutan	Perlu diadakannya pelatihan SDM ASN dan Non Asn berkelanjutan
5	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	1,726,065,700	1,509,272,359	Target sudah tercapai, namun masih rendahnya tingkat pelayanan	Dalam pelayanan harus ditingkatkan lagi
6	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	50	50	7,186,059,350	7,044,342,236	Target sudah tercapai, namun pengawasan terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah harus tetap lebih ketat	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
7	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bulan	12	12	5,937,293,636	5,531,291,644	Target sudah tercapai, namun penerima manfaat bertambah/berkurang. Progres pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya



			Pemerintahan Daerah						sesuai target rencana	
8	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340	340	1,911,289,000	1,471,398,421	Target sudah tercapai, namun perlu diadakannya pencatatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikelola dengan baik	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
9	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	40,641.30	29.307,80	61,404,068,052	55,503,177,594	Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih padi
			Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	13,000.00	1.658,70			Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih jagung
			Luas Tanam Palawija (Porang)	Hektar (Ha)	45	14			Tidak ada yang berminat untuk mengembangkan karena pemasarannya sulit dan harganya tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan	Melakukan analisa kembali dan memberikan solusi komoditi yang sesuai dengan daya dukung lahan yang ada di Kutai Kartanegara
			Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	27,781.65	14.827,22			Lahan yang bluas dengan Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok benih dan saprodi hortikultura



			Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	36,157.00	16.198,00			Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Melakukan pencegahan dan pengobatan penyebaran kepada manusia
			Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17,990.53	12.836,00			Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
			Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	16,908,000.00	19.370.909,00			Harga pakan yang sangat mahal, Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
10	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	Unit	10,981.00	10,981.00	45,599,068,052	40,817,299,382	Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
11	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	26	26	600,000,000	519,559,516	-Karena air sungai Mahakan sungai Mahakam surut, ternak kerbau tidak ada di kalang. Biasanya naik ke kalang jika kondisi air sungai Mahakan pasang, jadi tidak bisa melakukan pengukuran (survei harga)	Memberikan Pemberitahuan agar senantiasa melakukan Pengalangan jika akan melakukan kegiatan, koordinasi dengan tingkat bawah
			Jumlah Pengembangan	Komoditi	26	20			Terbatasnya sumber bibit	Masih berharap dari sumber luar,



			an Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan						ternak kerbau di Indonesia. - Provinsi Kalsel yang juga merupakan sumber bibit kerbau masih belum boleh mengeluarkan bibit karena ada terkendala penyakit Sura	maka membuat perencanaan untuk bisa mandiri
12	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan	Jenis	2	2	150,000,000	127,012,000	tidak ada kendala	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
13	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar dan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ton	1	1	275,000,000	202,342,400	tidak ada	tidak ada
14	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor	322	322	14,780,000,000	13,836,964,296	Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Mengkondisikan bibit berasal dari daerah yang bebas penyakit menular, atau bibit berasal dari kota lain.



15	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	20,000.00	20,000.00	65,923,291,920	59,057,156,564	Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	23	22			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	17,000.00	4,788			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	6	6			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
			Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	33	43			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
16	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	105	105	1,350,000,000	1,155,550,800	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun
17	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1	1	64,573,291,920	57,901,605,764	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanakan kegiatan di awal tahun



18	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	95	95	1,737,300,000	660,243,450	Target tercapai, namun terjadi Gangguan Alat Reproduksi, dan Terjadinya Distoksia dan lain - lain	Melakukan pemilihan bibit yang baik dan unggul agar tidak lagi terjadi gangguan Alt Reproduksi
			Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5	5			Dampak perubahan yang berpengaruh pada masyarakat agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Tersedianya Sarana (Daging Segar, Susu, Telur, Produk Olahan dan Produk Hewan) Pengendalian Daging dan Produk Olahan sehingga Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk di Konsumsi Masyarakat dan terbebasnya dari Gizi Buruk (Stunting) khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
19	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	1,012,300,000	58,350,000	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
20	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran	Jumlah Pengawasan	Jenis	2	2	200,000,000	151,500,000	Dampak perubahan yang berpengaruh	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya



		Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							pada masyarakat agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	
21	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	2	2	300,000,000	272,186,950	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
22	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persen	3	3	225,000,000	178,206,500	Lokasi ternak yang berjauhan sehingga memakan waktu dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari serta ternak yang tidak tervaksin karena dilepaskan pada saat pengobatan atau Vaksinasi pada saat itu	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya, melakukan perencanaan ditingkat bawah/teknis untuk membuat jadwal vaksinasi/pengobatan mengumpulkan ternak yang akan divaksin di satu tempat. Melakukan pengamanan terhadap ternak yang akan divaksin/diobati.
23	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	90	90	1,632,265,474	1,038,308,196	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya



24	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	Ha	2,400.00	2,400.00	1,632,265,474	1,038,308,196	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	35	400,000,000	138,934,000	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan
26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	20	20	250,000,000	51,029,000	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan
27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	Dokumen	15	15	150,000,000	87,905,000	Belum muncul Inisiatif/peremintaan pelaku ternak dalam pendampingan sedangkan sangat butuh pendamping baik itu petugas peternak maupun Dokter Hewan	Membuka Open recrutmen/ Petugas pendamping s peternak maupun Dokter Hewan
28	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas	Persen	3	3	20,144,278,650	17,130,361,375	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang	Memberikan penganggaran monitoring kelapangan



			Kelompok Tani						bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di nilai secara simultan	untuk verifikasi kelayakan
29	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	Persen	90	90	20,144,278,650	17,130,361,375	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berdedikasi masih kurang serta variabel penilaian yang simultan	Melakukan perencanaan pelatihan bagi SDM baik itu PPL/Petugas Pertanian, Petani dan Peternak
30		Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100					
			Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100					



REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan dalam mencapai kinerja di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2024 sebesar **Rp.244.200.9900.859,00** terealisasi sebesar **Rp.215.087.694.836,00** atau **88,08%** Realisasi anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



3.9 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Perternakan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASASI	PERSENTASE	KETERANGAN
		UTAMA					
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,96	4,3.36	109,49	
		Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,08	5,1	84	
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Padi	Ton	119.815,20	101.678,94	0,85	
		Produksi Jagung	Ton	86,895	8.542,50	9.831	
		Produksi Palawija (Porang)	Ton	540	540	100	
		Produksi Hortikultura	Ton	110.119	78.680,46	71	
3		Produksi Daging	Kg	14.603.000	28.069.290,00	192	



	Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Telur	Kg	1.691.000	2.451.881,00	145	
4	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil BPK/ Inspektorat Yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	
6	Terlaksananya Kepatuhan Input Sirup	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	



7	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Kepatuhan waktu input e—pantau dan telah diverifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	
8	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan barang milik daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100	
9	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian usulan standar harga satuan (SHS) Perangkat daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100	-
10	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) Perangkat daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun	Persen	100	100	100	-
11	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian indikator kinerja kunci (IKK) LPPD Perangkat daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	-



12	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	
13	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian Laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan rencana tindak lanjut (RTL) semester I paling lambat akhir bulan Juni dan semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	
14	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik (FKP)	Persen	100	100	100	
15	Menyelesaikan Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK)	Tindak lanjut hasil temuan administrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100	100	
16	Terlaksananya Ketepatan waktu penyampaian laporan SPIP	Ketepatan waktu penyampaian laporan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP perangkat daerah per 30 Juni tahun berjalan	Persen	100	100	100	



17	Penerapan core values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100	
18	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke pelaksana	Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100	
19	Terlaksananya Serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	88,08	88,08	
20	Ketersediaan Dokumen manajemen risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100	
21	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai maturitas SPIP pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	
22	Melaksanakan tata kelola arsip perangkat daerah	Nilai tata kelola ARSIP perangkat daerah	Persen	100	100	100	-
23	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Persen	100	64	64	-



24	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi inovasi perangkat daerah	Persen	100	100	100	-
25	Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Persen	100	100	100	-
26	Meningkatnya pengamanan aset	Pengaman aset tanah	Persen	75	75	75	-
27	Meningkatnya tata kelola aset	Pakta integritas pemakai aset BMD tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	-
28	Terlaksananya program pengentasan kemiskinan pada perangkat daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	1	-
29	Menurunnya prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target nasional	Persen	14	14	14	-
30	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100	-
31	Peningkatan Investasi	Capaian investasi kabupaten kutai kartanegara	Rupiah	7,3 T	-	-	-



32	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5%-3,5%	Persen	100	100	100	-
33	Kepatuhan pelaporan P3DN	Persentase tingkat kepatuhan pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40	40	-
34	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,6	3,7	-
35	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP pemerintah daerah	Nilai	73	73	73	-
36	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah	Nilai	64	64	100	
37	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Nilai	49,57	49,57	49,57	-
38	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik pemerintah daerah	Nilai	8,95	8,95	8,95	-
39	Meningkatnya kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai kepatuhan standar pelayanan pemerintah daerah	Predikat	Zona Hijau	Predikat	Zona Hijau	-



40	Terwujudnya kawasan tanpa rokok/vape	Kawasan tanpa rokok/vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100	-
41	Meningkatnya kepuasan masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100	-
42	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100	100	100	-
43	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian indikator kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	-
44	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan pemetaan kemampuan mengaji ASN perangkat daerah	Laporan	1	1	100	-
45	Terbentuknya unit pengumpul Zakat (UPZ) perangkat daerah	SK pembentukan UPZ perangkat daerah	Surat Keputusan	1	1	100	-



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp.244.200.9900.859,00** sedangkan total realisasi anggaran mencapai **Rp.215.087.694.836,00** dengan demikian dapat dikatakan bahwa serapan pelaksanaan anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2024 mencapai 88,08%.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan realisasi fisik sebesar lebih besar dari realisasi keuangandengan target program 78 dengan realisasi 86
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian berupa 1) luas tanam padi dengan target 40.641,30 hektar realisasi fisik 29.307,80 hektar 2) luas tanaman jagung dengan target 13.000,00 hektar realisasi fisik 1.658,70 hektar 3) luas



3. tanaman tanam palawija hektar 4) luas tanaman hortikultura 27.781,65 hektar realisasi fisik 14.827,22 hektar 5) peningkatan populasi ternak besar dengan target 36,157,00 ekor realisasi fisik 16.198,00 ekor 6) peningkatan populasi ternak kecil 18.441,00 ekor realisasi fisik 121.836,00 ekor 7) peningkatan populasi unggas 16.975.000,00 ekor realisasi fisik 19.370.909,00 ekor
4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa 1) panjang jalan usaha tani target 20,000 meter realisasi fisik 43.307,00 meter 2) Embung Peretanian target 23 unit realisasi 22 unit 3) panjang jaringan irigasi target 27.000 meter realisasi 25.738,94 meter 4) jumlah DAM Parit target 6 unit realisasi 6 unit 5) Jumlah pintu air 33 unit realisasi 43 unit.
5. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berupa; 1) persentase derajat target 95,00 persen realisasi 98,00 persen 2) cakupan pengawasan dengan target 5 jenis realisasi 5 jenis.
6. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian berupa persentase pengendalian dengan target 90,00 persen realisasi 90,85 persen.
7. Program perizinan usaha pertanian berupa cakupan pelaku usaha dengan target 90,00 persen realisasi 80,00 persen
8. Program penyuluhan pertanian berupa persentase kenaikan dengan target 3 persen yang terealisasi 2,40 persen.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Kartanegara.



SARAN DAN TINDAK LANJUT

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan, yaitu:

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian dan Peternakan, dengan Strategi pengembangan komoditas unggulan Pertanian dan Peternakan kedepannya perlu ditekankan, dikuatkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi dan teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan yang menguntungkan sampai dengan pemasaran produk hasil Pertanian dan Peternakan.
2. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok pekebun/tani dalam rangka peningkatan pendapatan pekebun.
3. Melakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur negara maupun petani melalui peningkatan kompetensi dan peningkatan kelembagaan guna meningkatkan usaha Pertanian dan Peternakan yang bertumpu dengan kemampuan dan kemandirian.
4. Melaksanakan sistem pengendalian internal dengan pemetaan resiko masing-masing kegiatan di semua bidang lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berdampak pada pencapaian out come kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta sebagai alat dalam memberikan informasi pelaksanaan kegiatan kedepann